

**Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan  
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh :**

**Herika Yuningsih  
NIM. 07011181520054**

**JURUSAN ILMU ADMINISRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Indralaya, Ogan Ilir  
Desember, 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PRIORITAS  
PEMBANGUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

HERIKA YUNINGSIH  
07011181520054

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 11 Januari 2019.

Indralaya, 11 Januari 2019

Ketua

Drs.Mardianto,M.Si  
NIP. 196211251989121001



Anggota

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



2. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



3. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP. 197905012002121005

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002



## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“ Semakin keras usaha maka akan semakin kuat pendirian. Hari ini berjuang, besok raih kemenangan”**

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini  
saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Herman. AK dan Ibunda Yuhana
- ✓ Saudaraku, Keluargaku, Kakak dan Adikku Hesti Utami dan Haikal Saputra
- ✓ Tim Akreditasi Jurusan Administrasi Negara
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku, Organisasi dan Komunitas
- ✓ Almamaterku

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan beberapa fenomena, yaitu kemiskinan masih menjadi isu strategis di Provinsi Sumatera Selatan, bantuan melalui program dan jaminan sosial belum tepat sasaran, masih rendahnya produktivitas kerja dan masih besarnya jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model teori Implementasi yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dilihat dari data masyarakat miskin masih mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, sering terjadinya mutasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, Belum optimalnya komitmen dan konsistensi daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di daerah. Saran berkaitan dengan temuan dari kendala yang diuraikan sebelumnya, yaitu perlu pembaharuan data masyarakat miskin, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan perlu meningkatkan kinerjanya, perlu dibuatnya kebijakan tentang panduan data masyarakat miskin yang digunakan.

**Kata Kunci : Implementasi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kemiskinan**

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Indralaya, 14 Januari 2019  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ***ABSTRACT***

This research is motivated by several phenomena, namely poverty is still a strategic issue in the South Sumatra, the assistance through programs and social security has not been on the right target, labor productivity is still low and also there are a large number of unemployed people in South Sumatra. These phenomena are regulated in South Sumatra Governor Regulation No. 34 of 2016 concerning Amendments to the Work Plan of the Regional Government of South Sumatra in 2017. This research was carried out at the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA), Social Service, and the Manpower and Transmigration Office of South Sumatra. The type of this study is descriptive that uses qualitative research methods. The type of data used is primary data and secondary data, while the technique of data collection has been done through observation, interview, and documentation techniques. This research uses the implementation theory model proposed by Donald Van Metter and Carl Van Horn. The results of this study indicate that the implementation of the program has not run optimally. This can be seen from the data of the poor society which is still referring to the Integrated Data Base (BDT) in 2015, the coordination team for poverty reduction frequently changes, and the commitment and regional consistency in implementing poverty reduction in the regions is not optimal. Suggestions related to the findings of the phenomena outlined earlier, that is the need for updating the data of the poor society, the coordination team for poverty reduction needs to improve its performance, and there is necessary to make a policy on the guidance of data on the poor society used.

***Keywords: Implementation, the Work Plan of Regional Government, poverty***

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Indralaya, 14 January 2019

Head of Public Administration Department  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahandaku Herman dan Ibundaku Yuhana yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya
3. Prof. Dr.H.Slamet Widodo, MS,MM selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Admnistrasi Negara dan Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
7. Seluruh Keluarga Besar BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan khususnya Ibu Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM. M. Kes, Bapak Ir. Hendrian, MT dan Bapak Dody Eko Prasetyo, ST
8. Seluruh Keluarga Besar Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Seluruh staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
10. Saudara-saudaraku, Hesti Utami dan Muhammad Haikal Syaputra serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
11. Seluruh kerabat dan sahabat penulis yang mendukung proses Skripsi ini, Puteri Anggieta Cahyani, Al'Aisyiyah Dwi Agustin, Rita Oktarina Ariyanti, Resty Anggraini serta teman teman seperjuangan angkatan 2015 Administrasi Negara
12. Teman-teman Tim Akreditasi Jurusan Administrasi Negara Stella Adelia, Triska Ramadini, Amala, Dewi Taradipa yang sudah membantu proses penyusunan skripsi ini.
13. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 11 Januari 2019

Penulis

Herika Yuningsih

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Praktis.....	10
2. Manfaat Teoritis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Kebijakan Publik .....	11
2. Implementasi Kebijakan .....	13
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .....	15
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Definisi Konsep .....	33
C. Fokus Penelitian .....	35
D. Informan Penelitian .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	37



F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	40
H. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan.....	44
a. Letak dan Kondisi Geografis .....	45
b. Topografi .....	45
c. Geologi .....	46
d. Hidrologi.....	47
2. Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	47
a. Visi dan Misi BAPPEDA .....	48
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	48
c. Struktur Organisasi .....	49
B. Hasil dan Pembahasan .....	63
1. Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 .....	64
2. Analisis dan Interpretasi Data Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 .....	65
a. Standar dan Sasaran Kebijakan.....	65
b. Sumber Daya .....	76
c. Karakteristik Agen Pelaksana.....	80
d. Disposisi Para Pelaksana .....	82
e. Komunikasi .....	83
f. Kondisi Sosial,Ekonomi dan Politik .....	85
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan RKPD.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3 Fokus Penelitian .....	35
Tabel 4 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten /Kota Tahun 2017.....	90
Tabel 5 Hasil Implementasi Kebijakan RKPD Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.....	95

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Sumsel dan Nasional Tahun 2002-2017.....	2
Gambar 2. Posisi Jumlah Pemduduk Miskin Sumsel Secara Nasional Tahun 2017....	3
Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2017.....	5
Gambar 4. Mata Pencarian Penduduk Miskin Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan .....	6
Gambar 5. Rangkaian Implementasi Kebijakan .....	14
Gambar 6. Model Implementasi Kebijakan Menurut ann Meter dan Van Horn.....	29
Gambar 7. Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 8. Alur Penyusunan RKPD .....	69
Gambar 9. Inovasi Siklus Penyusunan RKPD .....	69
Gambar 10. Dokumentasi Wawancara .....	76
Gambar 11. Struktur Organisasi TKPK.....	78
Gambar 12. Dokumentasi Wawancara .....	79
Gambar 13. Dokumentasi Wawancara .....	82
Gambar 14. Angka Partisipasi Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama .....	86
Gambar 15. Angka Partisipasi Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Atas .....	87
Gambar 16. Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan tahun 2017 .....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Surat Tugas Pembimbing .....	103
2. Lembar Revisi Seminar Proposal .....	104
3. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi .....	107
4. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I .....	108
5. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II .....	109
6. Lembar Revisi Ujian Skripsi .....	110
7. Surat Izin Penelitian .....	114
8. Surat Balasan Instansi .....	118
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 .....	121
10. Pedoman Wawancara .....	125

## DAFTAR SINGKATAN

1. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. APM : Angka Partisipasi Murni
4. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. BDT : Basis Data Terpadu
6. BPS : Badan Pusat Statistik
7. BPTN : Bantuan Pangan Non Tunai
8. DAS : Daerah Aliran Sungai
9. IKU : Indikator Kinerja Utama
10. ILO : International Labor Organization
11. ISO : *The International Organization For Standardization*
12. KAT : Program Komunikasi Adat Terpencil
13. KB : Keluarga Berencana
14. KBPU : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
15. KUA : Kebijakan Umum APBD
16. KUBE : Kelompok Usaha Bersama
17. KUR : Kredit Usaha Rakyat
18. LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
19. OPD : Organisasi Perangkat Daerah
20. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
21. PK : Perjanjian Kinerja
22. PNPM : Nasional Masyarakat Mandiri Pedesaan
23. PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran
24. PPSIP : Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
25. RKA : Rencana Kerja Anggaran
26. RAPBD : Rencana Anggaran dan Belanja Daerah
27. RASTRA : Beras Sejahtera
28. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
29. RKP : Rencana Kerja Pemerintah
30. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
31. RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
32. RSBI : Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
33. RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
34. SBI : Sekolah Bertaraf Internasional
35. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
36. SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
37. SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
38. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
39. SOP : Standar Operasional Prosedur
40. SSN : Sekolah Standar Nasional
41. TKI : Tenaga Kerja Indonesia
42. TKPKD : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
43. TNP2K : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
44. UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

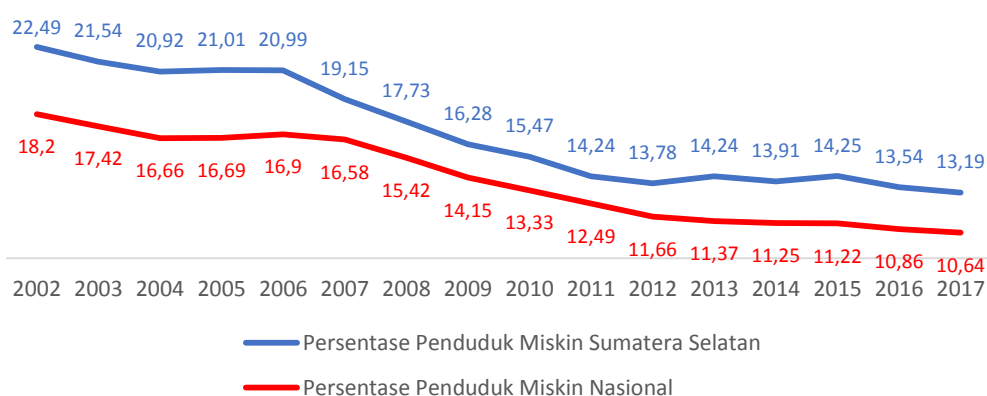
Perencanaan pembangunan untuk negara berkembang termasuk Indonesia, masih mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih tepat dan terarah. Mekanisme perencanaan menyangkut dengan proses pelaksanaan, instansi terlibat, jadwal pelaksanaannya, dan pejabat yang berwenang menetapkan dokumen perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 menyebutkan perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Salah satu hasil dari perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 merupakan RKPD tahun keempat periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018. Prioritas daerah RKPD tahun 2017 tetap mengacu pada program prioritas dalam RPJMD, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2018) kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu batas untuk mengelompokan penduduk kedalam kategori miskin atau

tidak miskin, yang terdiri dari penjumlahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Dalam konsep kemiskinan, apabila pendapatan perindividu Rp. 397.000 perbulan, maka termasuk ke dalam kategori miskin. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada pertengahan Juli 2018 ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta jiwa (9,2%). Angka ini berkurang sekitar 630 ribu jiwa dibandingkan kondisi september 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12%).

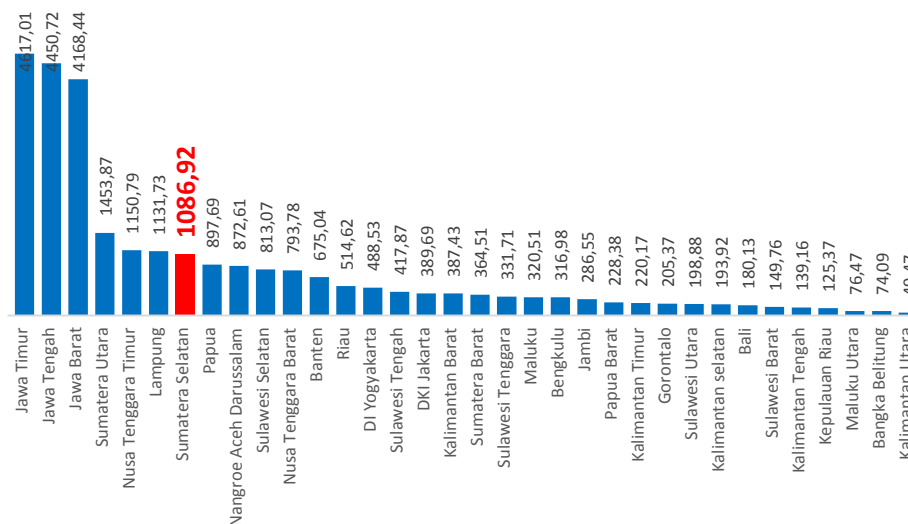
Provinsi Sumatera Selatan baik secara jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 16,28 persen hingga 2017 sebesar 13,19 persen dan secara keseluruhan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dengan total sebesar 3,09 persen.



### **Gambar I. Persentase Tingkat Kemiskinan Sumsel dan Nasional Tahun 2002–2017**

*Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017*

Secara nasional, capaian Provinsi Sumatera Selatan juga sangat relevan sejalan dengan penurunan capaian rata-rata nasional. Meskipun angka Provinsi Sumatera Selatan berada diatas rata-rata nasional, namun secara peringkat posisi Sumatera Selatan saat ini telah bergerak kearah yang lebih baik dibandingkan dengan posisi pada tiga tahun sebelumnya.



**Gambar II. Posisi Jumlah Penduduk Miskin Sumsel Secara Nasional Tahun 2017**

*Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017*

Apabila dilihat dari porsi jumlah penduduk miskin, Provinsi Sumatera Selatan menduduki urutan ke 7 tertinggi pada tahun 2017 dari 34 Provinsi di Indonesia. Tentunya capaian Provinsi Sumatera Selatan tersebut merupakan akumulasi dari semua capaian kemiskinan di 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Meskipun tingkat kemiskinan di level nasional telah menurun, namun tingkat penurunan dan tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda-beda.

Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan tahun 2009-2017, kemiskinan diperdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan diperdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Garis kemiskinan nasional lebih tinggi daripada kemiskinan di perdesaan, dan garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada garis kemiskinan nasional, karena pengeluaran di perkotaan lebih mahal dibandingkan rata-rata nasional dan apalagi dibandingkan dengan perdesaan. Beberapa komoditi yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan pada tahun 2017 antara lain adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan daging sapi.

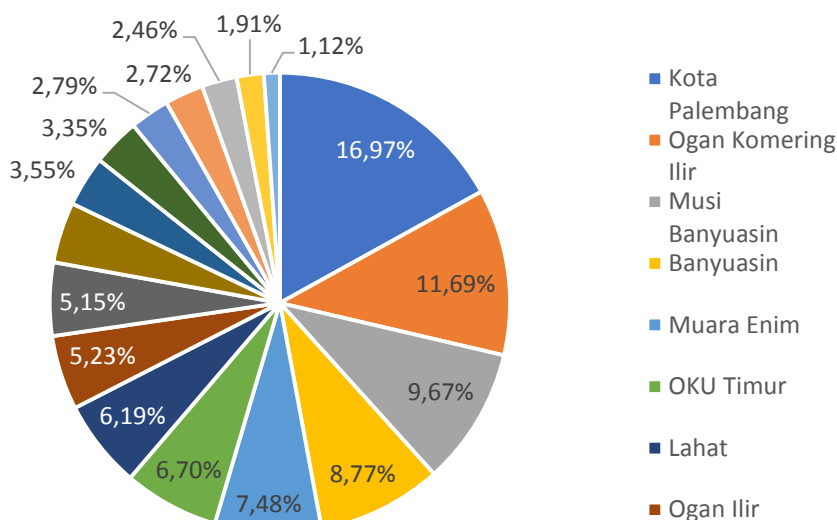


**Tabel I. Perkembangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Tk Kemiskinan (%)	Jumlah Kemiskinan
1	Kota Palembang	11.4	184,410
2	Ogan Komering Ilir	15.75	127,060
3	Musi Banyuasin	16.75	105,080
4	Banyuasin	11.47	95,280
5	Muara Enim	13.19	81,300
6	OKU Timur	11,0	72,810
7	Lahat	16.81	67,330
8	Ogan Ilir	13.58	56,850
9	Musi Rawas	14.24	55,960
10	Ogan Komering Ulu	12.95	46,340
11	OKU Selatan	10.98	38,630
12	Musi Rawas Utara	19.49	36,460
13	Empat Lawang	12.44	30,290
14	Kota Lubuk Linggau	13.12	29,540
15	PALI	14.53	26,750
16	Kota Prabumulih	11.42	20,720
17	Kota Pagar Alam	8.89	12,120
	<b>Provinsi Sumsel</b>	<b>13.19</b>	<b>1,086,930</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Jika dilihat kontribusi penyumbang kemiskinan Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017, maka Kabupaten/Kota penyumbang jumlah penduduk miskin tertinggi adalah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Penduduk miskin terkonsentrasi paling banyak di Kota Palembang. hal ini menunjukkan bahwa semakin padat jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah penduduk miskin yang berada di daerah tersebut. Namun apabila dilihat dari sebaran secara persentase, maka kabupaten/kota yang paling tinggi bahkan di atas persentase provinsi adalah Kabupaten Muratara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.



**Gambar III. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2017**

*Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017*

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemiskinan masih menjadi isu strategi dan terdapat dua masalah utama yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan yaitu :

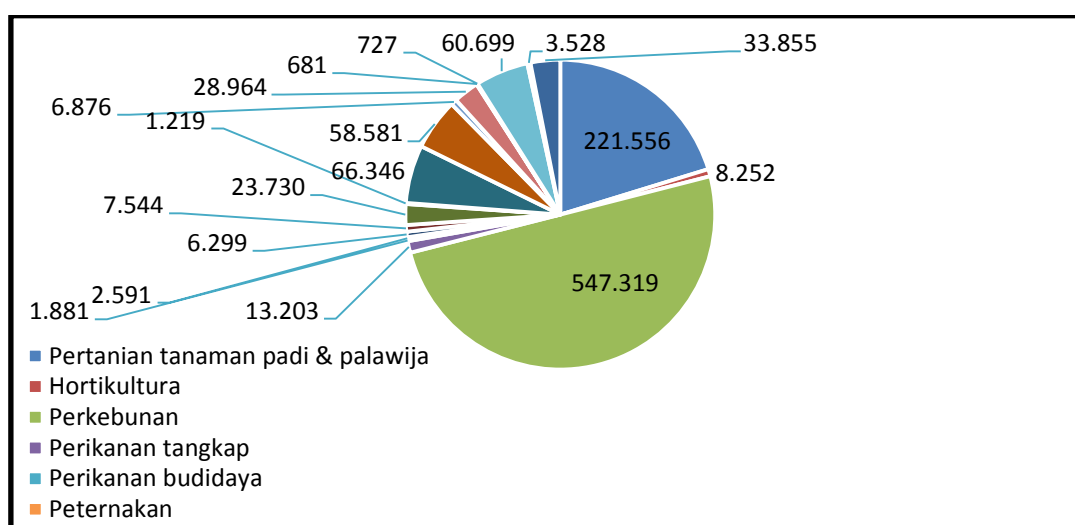
**a. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja**

Berdasarkan analisis data dari Basis Data Terpadu (BDT) yaitu data yang tersedia berisikan nama dan alamat seluruh penduduk Indonesia yang diurutkan menurut peringkat kesejahteraan tergambar pola permasalahan dimensi kemiskinan non konsumsi/non makanan yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan infrastruktur.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan di dominasi oleh ketenagakerjaan. telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang. Jumlah pengangguran pada Agustus 2017 sebesar 7,04 juta jiwa dari Agustus 2016 sebesar 7,03 Juta Jiwa. Jumlah angkatan kerja yang masuk mencapai 3 juta orang per

tahun, jadi komposisi pekerja dan penganggurannya akan terus naik seiring jumlah penduduk. Sasaran berkurangnya pengangguran tenaga kerja belum maksimal jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Selatan yang sebesar 4,39 persen diatas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sebesar 4,23 persen pada tahun 2016 dan 2017.

Selain itu, masih banyak penduduk miskin yang tidak memiliki mata pencaharian dan pekerjaan yang layak bahkan tidak berkerja sama sekali atau terbatasnya kesempatan kerja. Mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga menerangkan bahwa dari 19 mata pencaharian penduduk miskin di Sumatera Selatan yang ada, mata pencaharian tertinggi memang didominasi pada sektor perkebunan (50,04%), pertanian tanaman padi palawija (20,25%), dan bangunan (6,07%). Pada sektor perkebunan terutama perkebunan karet lebih kurang 90 persennya adalah perkebunan rakyat yang tentunya pendapatan petani karet tersebut berkaitan dengan harga dan hasil panen karet. Ketika harga panen karet jatuh akan berdampak langsung pada pendapatan petani karet yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.



**Gambar IV. Mata Pencarian Penduduk Miskin Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Sumber : Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 2017

Umumnya penduduk miskin yang bekerja di sektor perkebunan dan pertanian mengindikasikan juga rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari sektor tersebut, rendahnya kepemilikan lahan yang menyebabkan penduduk menjadi buruh tani, rendahnya sertifikasi kepemilikan lahan mengakibatkan rendahnya akses untuk permodalan dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi, terjadinya alih fungsi lahan utamanya pertanian yang menyebabkan pengangguran, serta masih adanya kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan yang menyebabkan rendahnya kemampuan sumber daya manusia terutama generasi muda miskin yang selanjutnya akan menyebabkan pengangguran atau menjadi buruh.

Pengangguran akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan berakibat pada tidak adanya pendapatan yang akhirnya dapat menyebabkan kesejahteraan akan semakin merosot. Semakin menurun kesejahteraan akibat menganggur, dapat mengakibatkan peluang terjebak dalam kemiskinan. Tingginya angka pengangguran, secara ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan dalam peningkatan produktivitas regional, dan secara sosial mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat. Dengan demikian secara perlahan masyarakat akan terdorong pada kelompok penduduk miskin. Jumlah pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan. Tingkat pengangguran dapat menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dimana sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Jaminan dan Bantuan Sosial belum tepat sasaran**

Permasalahan kedua didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu jaminan dan bantuan sosial belum tepat sasaran. Banyak program dan bantuan sosial seperti sekolah gratis, berobat gratis, rastra (beras sejahtera) dan program lainnya yang sudah dibuat tetapi ketika di implementasikan tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan, dan pemerintah tidak mencari tahu apa yang menjadi penyebab terhambatnya implementasi program tersebut. Sementara itu, data yang dipakai untuk menjalankan program masih menggunakan data Basis Data Terpadu (BDT) ditahun 2015.

Program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta belum tepat sasaran. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah. Kendala mendasar lainnya adalah banyak dari pengambil keputusan terkadang kebingungan untuk mengetahui secara mendalam apa yang benar-benar menjadi penyebab dari kemiskinan. Data dan informasi yang menjadi dasar dari sebuah perencanaan dan sasaran pelaksanaan pada setiap penerima program/kegiatan terkadang tidak dapat disajikan dan digunakan dengan baik. Setiap tahunnya berbagai program/kegiatan yang tidak sedikit anggarannya telah dijalankan dengan harapan kemiskinan terus dapat bisa ditekan. Namun tetap saja angka kemiskinan relatif cukup tinggi dan penurunannya cenderung melambat dan landai. Akan menjadi percuma berbagai obat-obat penanggulangan kemiskinan banyak disuntikan jika tidak benar-benar diketahui siapa saja yang diobati, apa saja penyakitnya dan dimana saja sakitnya.

Pengentasan kemiskinan mempunyai permasalahan kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara cepat dan instan. Permasalahan mendasarnya adalah berbagai program yang telah dilaksanakan selama ini dirasa belum optimal akibat kurang efektif dan efisiennya akses terhadap data penduduk miskin. Selain itu, juga belum ada *mapping*/kesesuaian program/kegiatan dengan sasaran penerima manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam mendukung penanggulangan kemiskinan sangat tepat. Sebuah aplikasi yang dapat berfungsi untuk

pendataan kemiskinan (*single database*), analisa sederhana, serta memberikan masukan terhadap kebijakan didalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tentunya perlu dicatat bahwa dampak dari suatu program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan saat ini tidak dapat tergambar dalam waktu yang instan dan singkat, perlu waktu yang cukup panjang untuk mengukur program yang dilaksanakan saat ini terhadap dampak penurunan yang diharapkan, dan berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dilatar belakang tesebut, maka dirumuskanlah permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017?

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dan semua Instansi yang terlibat didalamnya dalam mengentaskan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Kebijakan Publik mengenai Implementasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prioritas Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*: Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Alfabeta. Bandung.
- Effendi Sofian, & Singarimbun, Masri. 2015. *Metode Penelitian Survei*: LP3ES. Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*: Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*: Gramedia. Jakarta
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Manajemen*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Suharto,Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*: Alfabeta: Bandung
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*: Prenadamedia Group. Jakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*: AIPI. Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*:CAPS. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*:CAPS. Yogyakarta.



**SUMBER JURNAL:**

Agistiani, Nisa. 2011. *Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*.13(1): 35-37.

BPS, 2017. *Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan Periode Maret 2010-2016* (online), (<https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2016/07/19/63/garis-kemiskinan-provinsi-sumatera-selatan-periode-maret-2010---maret-2016.html>, diakses 15 Oktober 2018).

Cindy,Ulfa. 2013. *Implementasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. 14(2): 14-15

Mahsunah, Durrotul. 2013. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan*.13(1): 3-6.

Rini, Ayu. 2016. *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia*, 16(1):3-5.

Sari, Paramita. 2016. *Analisis PDRB, Tingkat Pendidikandan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-201*, 16(2): 13-15.

Utomo,Agung. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro Di Lima Belas Provinsi Tahun 2007*, 10(6): 9-12.

Wahyu, Agnes.2017. *Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, 17(1):7-11

**SUMBER PERATURAN:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

## **DOKUMEN**

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.2017.  
*Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. Provinsi Sumatera  
Selatan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.2013-  
2018.*Rencana Pembangunan Jangka menengah* . Provinsi Sumatera Selatan: Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemerintahan Republik Indonesia Kementerian Sekretaris Negara. 2015. *Basis Data  
Terpadu 2015*. Indonesia: Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.

## **SKRIPSI**

Sulasih, Uliyah 2018. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMA  
Negeri 1 Sungai Lilin Tahun 2016*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Sundari, 2017. *Implementasi Kebijakan Pengaturan Operasional Angkutan Barang Di  
Kota Palembang*. Indralaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

## **RUJUKAN DARI INTERNET**

[www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.bappeda.sumselprov.go.id](http://www.bappeda.sumselprov.go.id)